

ABSTRAK

Novika Lumbangaol. NIM. 3103111058. “Implementasi UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik sederhana (persentase). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan pegawai di kantor Bupati Tapanuli Utara yang berjumlah 127 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan perwakilan responden/narasumber yang ada di kantor Bupati Tarutung yaitu 20% yang berjumlah 26 orang. Adapun rumus teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan table frekuensi.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu pemerintah telah menunjukkan peran aktifnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tapanuli Utara, yakni dengan mengetahui dan memahami Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melakukan transparansi kepada masyarakat. Dengan adanya Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus terbuka dalam memberikan informasi kepada rakyat. Dalam menyampaikan informasi publik, pemerintah menggunakan media agar informasi dapat sampai kepada masyarakat dengan cepat. Media yang digunakan masyarakat yaitu media cetak, media elektronik dan media internet. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pemerintah mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Birokrasi yang ada di Tapanuli Utara sudah tidak ada lagi yang tidak transparan. Bupati Tapanuli Utara memerintahkan kepada seluruh birokrasi transparan akan setiap program kebijakan publik.